

Menyongsong Hari Esok  
dengan Optimisme dan Integritas

# Laporan Kinerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas pencapaian target yang dibebankan kepada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2023. Laporan Kinerja dimaksud wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk kepatuhan kami terhadap peraturan yang dimaksud, sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam rangka mewujudkan *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam waktu mendatang. Selain itu, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai input bagi Kantor Pusat DJKN dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon, Kepala KPKNL Jayapura, Kepala KPKNL Sorong, dan Kepala KPKNL Biak beserta jajaran dan seluruh pegawai atas kerjasama dan kerja kerasnya dalam pengumpulan data dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Kami harap Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jayapura, [@TanggalND]  
Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik  
Wibawa Pram Sihombing

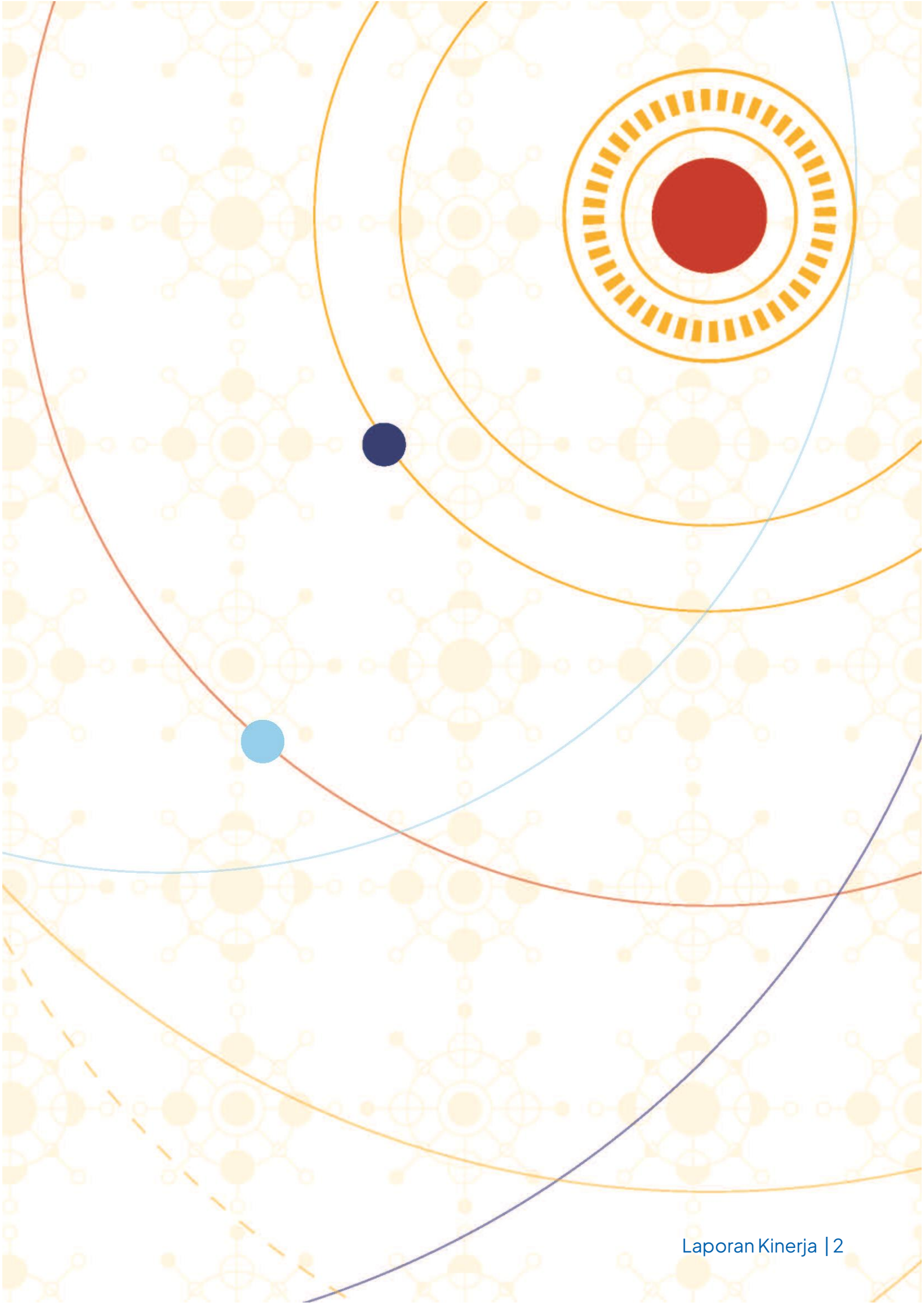
# Daftar Isi

<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
		Sumber Daya Manusia	5
		Sarana dan Prasarana	6
		Peran Strategis	7
		Permasalahan	8
		Upaya Pemecahan Masalah	9
<b>II</b>	<b>Perencanaan kinerja</b>	Rencana Strategis	15
		Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2023	18
		Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2023	19
<b>III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	Capaian Kinerja Organisasi 2023	24
		Realisasi Anggaran	36
<b>IV</b>	<b>Penutup Lampiran</b>		41
			42

# BAB I

## Pendahuluan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat dari pengelolaan dari peredaran uang negara.



# Bab I

## Pendahuluan

### A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon II (kepala kantor), 6 jabatan eselon III, dan 15 jabatan eselon IV yang terdiri sebagai berikut.

1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Bidang Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.
4. Bidang Piutang Negara, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan

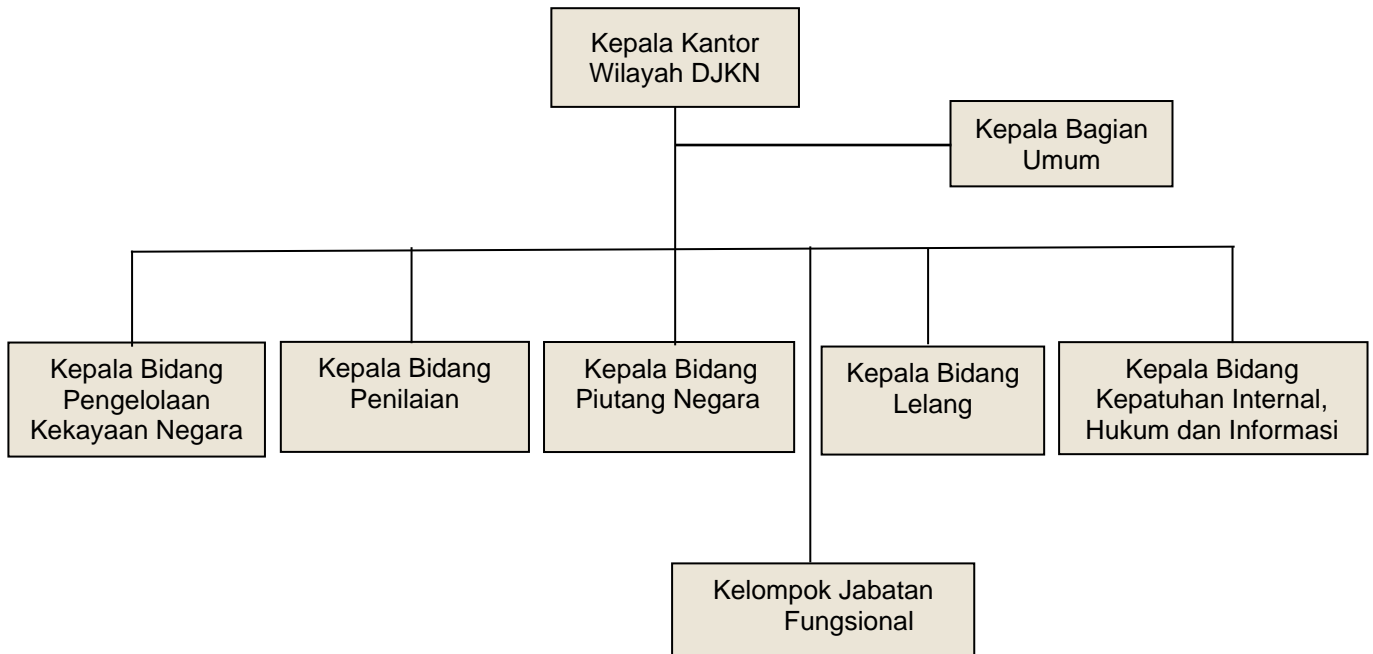
piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara.

5. Bidang Pelayanan Lelang, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang.
6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
  - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan; dan
  - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan

bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

Bagan Organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

### Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

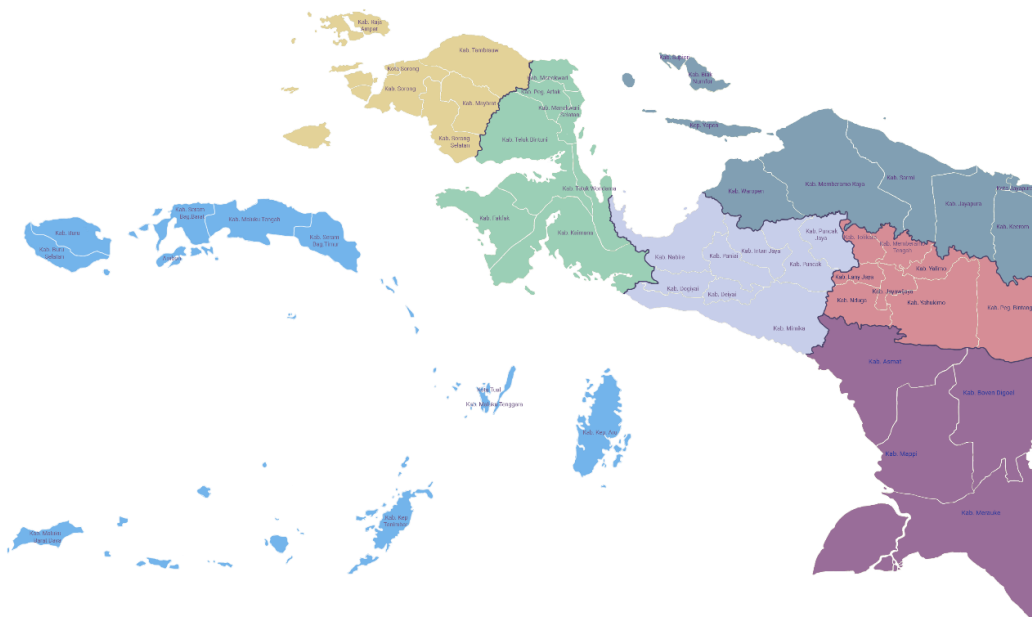


Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang dengan wilayah mencakup 7 provinsi, yaitu:

1. Provinsi Papua;
2. Provinsi Papua Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah);
3. Provinsi Papua Pegunungan (UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan);
4. Provinsi Papua Selatan (berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan);

5. Provinsi Papua Barat;
6. Provinsi Papua Barat Daya (UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya);
7. Provinsi Maluku.

Peta Wilayah Kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku



Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menyelenggarakan fungsi:

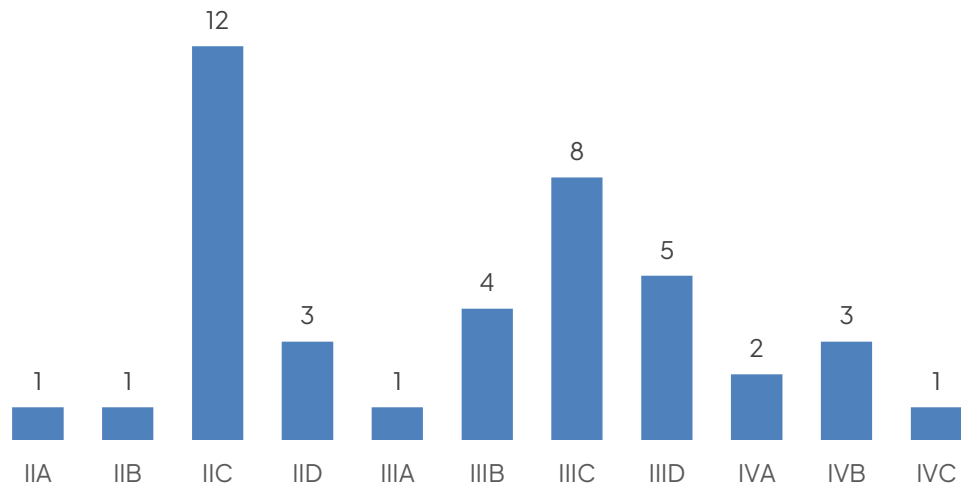
1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;

5. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

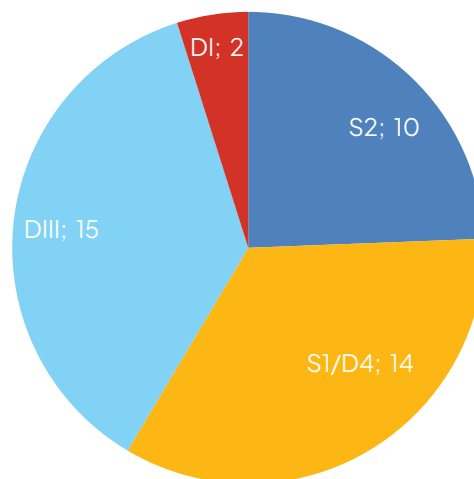
## **B. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta kantor operasional di bawahnya pertanggal 31 Desember 2023 berjumlah 41 pegawai termasuk dengan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga), dengan komposisi sebagai berikut :

Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan



### C. Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan operasionalnya Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menempati Gedung Keuangan Negara Jayapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Disamping itu, guna kelancaran tugas Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas jabatan 1 (satu) unit mobil kondisi baik;
2. Kendaraan dinas operasional sebanyak 7 (tujuh) unit minibus kondisi 4

(empat) baik dan 3 (tiga) rusak ringan dan 2 (dua) unit sepeda motor dalam kondisi baik;

3. komputer (PC) sebanyak 20 (dua puluh) unit, 18 unit dengan kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak ringan) dan laptop sebanyak 39 unit dalam kondisi baik;
4. ruang kerja yang ber-AC;
5. sarana penunjang lainnya berupa peralatan dan mesin; dan
6. rumah dinas 10 (sepuluh) unit dengan 6 (enam) unit dalam kondisi baik dan 4 (empat) unit dalam kondisi rusak ringan.

#### D. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Pelayanan Lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara pada wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Selain itu Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan pembinaan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara

yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Memberikan pelayanan Lelang

Lelang berperan besar dalam menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi sehingga lelang oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan untuk ikut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lelang memiliki 3 peran dalam perekonomian nasional yaitu:

- a. membantu pemulihan keuangan negara dengan menegakkan hukum melalui penjualan barang rampasan, sitaan dan barang milik negara;
- b. menyelesaikan kredit macet atau *non performing loan* (NPL) dengan tujuan untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan, melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang;
- c. menggerakkan roda perekonomian dengan meningkatkan potensi nilai barang dan membuka lapangan pekerjaan.

### 4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya

disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

## E. Permasalahan

### Permasalahan Internal

- a. sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah Kanwil DJKN yang mempunyai wilayah yang cukup luas (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku) dengan *stakeholder* yang cukup banyak;
- b. anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- c. sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.

### Permasalahan Eksternal

- a. kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalami pemekaran sehingga wilayah kerja provinsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku bertambah yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya;
- b. tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- c. adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, misalnya aturan kompensasi adat untuk pelepasan tanah, sehingga untuk lelang tanah, kurang menarik bagi calon pembeli.

## F. Upaya Pemecahan Masalah

### Pemecahan Permasalahan Internal

- a. telah diajukannya permohonan penambahan pegawai Fungsional ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku ke berbagai diklat dan sosialisasi/*workshop*. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga sering mengadakan sendiri sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal;
- b. mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran; dan
- c. mengajukan permohonan penambahan Pagu Anggaran khususnya untuk jenis belanja modal dan belanja barang.

### Pemecahan Permasalahan Eksternal

- a. mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan *stakeholder* di satu tempat;
- b. lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi; dan
- c. meningkatkan kemampuan para pegawai DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.

## Bab II

# Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2023
- C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2023

kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia



## Bab II

# Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2022-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi DJKN, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

## 1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- a. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## 2. Tujuan

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;
- c. pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- d. birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

## 3. Sasaran

- a. mempercepat penyelesaian kasus Piutang Negara dan pencapaian target IKU;
- b. tercapainya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;

- c. meningkatkan kualitas Pelayanan Lelang;
- d. meningkatkan pengelolaan data dan meminimalisasi perkara hukum;
- e. melakukan Inventarisasi Kekayaan Negara secara menyeluruh, untuk meningkatkan manfaat dari kekayaan negara serta utilisasi kekayaan negara secara umum;
- f. melaksanakan Penilaian Kekayaan Negara sehingga diketahui nilai riil kekayaan negara; dan
- g. meningkatkan dukungan teknis dan administrasi Kanwil DJKN.

#### 4. Kebijakan dan Program Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

##### a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) peningkatan Pembinaan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas Pelayanan Lelang;
- 3) peningkatan kualitas, pengawasan, dan pembinaan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 4) peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas dalam Pelayanan Penilaian;
- 5) peningkatan kualitas penyajian informasi dan pengoptimalisasi penanganan perkara.

##### b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) percepatan pelayanan Lelang;
- 3) mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan negara, Piutang, dan Lelang;
- 4) mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;
- 5) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 6) tertib administrasi BMN;
- 7) optimalisasi utilisasi kekayaan negara; dan
- 8) Penilaian BMN.

## B. Penetapan Kontrak Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2023 sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu Two terdiri dari 11 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian lengkap tentang SS dan IKU tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
			Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100
		Persentase produktivitas lelang	80	100
		Indeks Integritas	88.67	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
			Kuantitas/ Output	Kualitas/ Mutu
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100	100
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Presentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100	100
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	100
		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25	100
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70	100

### C. Addendum Kontrak Kinerja Tahun 2023

Pada bulan September September 2023, dilakukan Adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-29/KN/2023 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pada Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

#### 2. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU
4c2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	6c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

### 3. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
10a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
4c2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	6c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

### 4. Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
4c1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%	4d-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68

### 5. Penghapusan IKU dan Sub-IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
4c-N	Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku karena Sub-IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan menjadi IKU.
6b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
10a-N	Indeks integritas organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku karena Sub-IKU Indeks integritas bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dihapus.
10a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	Sub-IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

## 6. Perubahan Trajectory IKU dan Sub-IKU

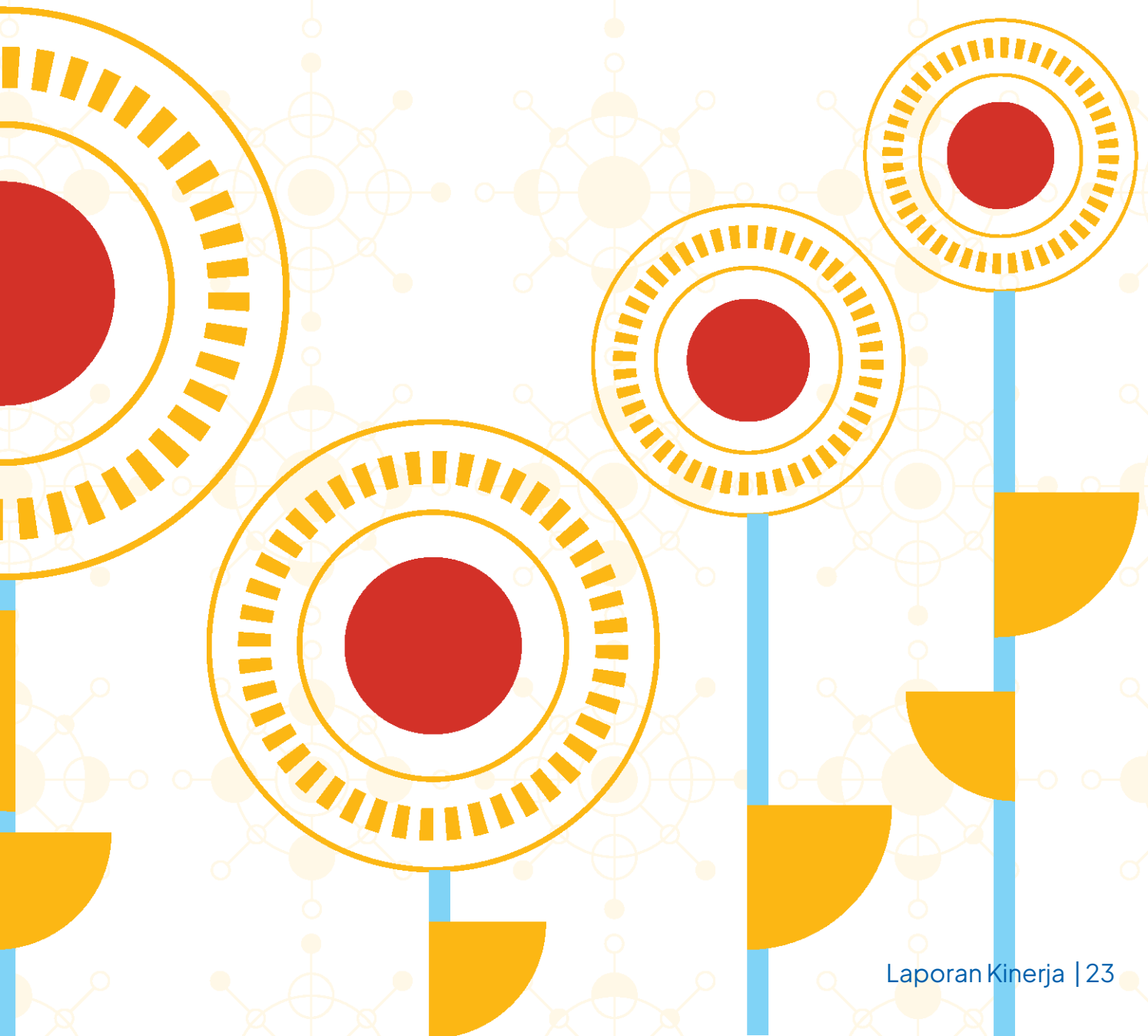
Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	78%	78%	90%	90%	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	78,50 %	78,50 %	90%	90%
8a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100 (95%)	8a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100
8a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	100 (3,55 Skala 4)	8a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 Skala 4)	100 (3,55 Skala 4)	100 (3,55 Skala 4)
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karena peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat



## Bab III

### Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	109,13%	109,13%
		Persentase produktivitas lelang	80%	116,22%	120,00%
		Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	81,78%	81,78%
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	128,62%	120,00%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100%	118,04%	118,04%
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	125,00%	120,00%
		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	80,13%	117,84%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,19%	120,00%
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70	94,15	120,00%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang secara <i>online</i>	90%	99,33%	110,36%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	116,24%	116,24%
7.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86%	97,29%	113,12%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
8.	Penguatan Tata Kelola Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu	100	128,30	120,00%
9.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	114,52	114,52%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	139,90%	120,00%
10.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	84,70	120,00%
11.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80,00	96,65	120,00%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%	120,00%

Berdasarkan hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Two Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2023 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut:

### SS 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

K-WIDE	SS 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1a-CP - Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	19,47%	39,09%	39,09%	60,64%	60,64%	109,13%	109,13%	
Capaian	120%	120%	120%	101%	101%	109%	109%	

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2023 sebesar Rp33.723.493.376,- atau sebesar 147,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.800.000.000,- .

K-WIDE	SS 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1b-CP - Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	
Realisasi	56,11%	67,61%	67,61%	91,52%	91,52%	116,22%	116,22%	
Capaian	120%	120%	120%	114%	114%	120%	120%	

K-WIDE	SS 10: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	1c-CP - Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian						100,56%	100,56%	

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Responden terdiri dari internal yaitu Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel, dan eksternal yaitu Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, Indeks Integritas Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2023 mencapai 89,17, atau 100,56% dari target 88,67.

## SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP - Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	9,96%	21,17%	21,17%	45,62%	45,62%	81,78%	81,78%	
Capaian	50%	53%	53%	65%	65%	82%	82%	

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 81,78% atau sebesar Rp655.774.728.556,- dari target sebesar Rp801.900.000.000,-. Tidak tercapainya target pokok lelang terjadi karena potensi lelang laku pada tahun 2023 tidak sebesar potensi lelang laku pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan data pokok lelang Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak rata-rata 70% sampai dengan 80% pokok lelang berasal dari lelang Pegadaian. Terlebih lagi pada tahun 2021 dan 2022, PT Pegadaian (Persero) menerapkan kebijakan/program *recovery* atas *outstanding loan* sebagai strategi penurunan tingkat kredit macet/*non performing loan* (NPL) dengan cara melelang objek gadai tanpa perpanjangan masa gadai. Hal ini merupakan respons perusahaan atas situasi perekonomian yang terjadi paska Pandemi COVID-19. Kebijakan ini tidak dilanjutkan pada tahun 2023 sehingga potensi objek lelang menjadi menurun. Di sisi lain baik Kanwil DJKN maupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PT Pegadaian (Persero) agar menaikkan frekuensi maupun pokok lelang pegadaian.

K-WIDE	SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP - Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	15,96%	16,67%	16,67%	24,61%	24,61%	128,62%	128,62%	
Capaian	120%	56%	56%	41%	41%	120%	120%	

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dihitung berdasarkan Nilai Outstanding Piutang Negara yang berhasil diturunkan oleh KPKNL di wilayah

kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang dihitung dari pembayaran angsuran oleh debitur dan nilai pengembalian BKPN, Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT), dan nilai penyelesaian dengan *Crash Program* Keringanan Utang (CPKU). Pada Tahun 2023, IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berhasil mencapai angka 128,62%. Angka tersebut tercapai sebagai hasil dari sinergi bersama Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan KPKNL dalam mitigasi risiko dan penyusunan langkah-langkah dan strategi guna mengantisipasi para debitur piutang negara yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan utangnya.

### SS 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

K-WIDE	SS 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-N - Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	
Realisasi	5,11%	10,23%	10,23%	11,93%	11,93%	106,40%	106,40%	
Capaian	120%	120%	120%	108%	108%	106%	106%	

Realisasi indeks kepuasan pelanggan layanan Kanwil dan KPKNL pada tahun 2023 sebesar 106.40% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

### SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

K-WIDE	SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	4a-CP - Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi		40,31%	40,31%	67,16%	67,16%	118,04%	118,04%	
Capaian		101%	101%	112%	112%	118%	118%	

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah). Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mencapai 118,04% dari target yang ditetapkan.

K-WIDE	SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	4b-CP - Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	17,86%	32,14%	32,14%	57,14%	57,14%	125,00%	125,00%	
Capaian	120%	107%	107%	95%	95%	120%	120%	

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dihitung berdasarkan jumlah BKPN yang diselesaikan oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan mekanisme pembayaran lunas, pengembalian, Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT) ataupun dengan mekanisme *Crash Program* Keringanan Utang (CPKU). Pada Tahun 2023, IKU Persentase Penyelesaian BKPN dari Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berhasil mencapai angka 125%. Angka tersebut tercapai sebagai hasil dari sinergi dan mitigasi bersama antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan KPKNL dalam menyelesaikan kasus-kasus piutang negara yang susah dan terkendala dalam penyelesaian BKPN-BKPN tersebut.

K-WIDE	SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	4d-CP- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%	
Realisasi		81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	80,13%	80,13%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	118%	118%	

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 117,84%;

Tahun 2023 IKU dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan realisasi:

- a. pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta KPKNL dengan Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

### SS 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

K-WIDE	SS 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5c-CP - Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
Realisasi	0,19%	0,10%	0,10%	0,26%	0,26%	0,21%	0,21%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Pada tahun 2022, dengan target 19%, Kanwil

DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku mendapatkan capaian standar deviasi 1,04% yang mana di dapat dari rata-rata KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku sehingga dengan iku polarisasi minimize tercapai capaian deviasi sebesar 199,24%.

K-WIDE	SS 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5b-N - Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	
Realisasi	98,60	94,42	94,42	94,29	94,29	93,91	93,91	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian mencakup penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi. Pada tahun 2022, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku mendapatkan indeks penilaian sebesar 134,50%.

### SS 6: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

K-WIDE	SS 6: Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-N - Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	57%	67%	67%	78%	78%	90%	90%	
Realisasi	99,58%	99,40%	99,40%	99,23%	99,23%	99,33%	99,33%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	110%	110%	

Pada tahun 2023 realisasi dari persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* 100.00% dan realisasi Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online 114,72%.

K-WIDE	SS 6: Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6c-N - Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	18,11%	62,52%	62,52%	93,14%	93,14%	116,24%	116,24%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	116%	116%	

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur yang diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Perhitungan Persentase Evaluasi Kinerja BMN dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang atas aset yang ditindaklanjuti dengan target aset. Pada tahun 2023, Capaian Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) sebesar 116,24%.

### SS 7: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

K-WIDE	SS 7: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	7a-N - Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	86%	86%	
Realisasi		63,23%	63,23%		63,23%	97,29%	97,29%	
Capaian		120%	120%		120%	113%	113%	

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas

pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. Perhitungan atas Tingkat efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dilakukan dengan menghitung rata-rata Capaian Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN. Pada tahun 2023, realisasi dari tingkat efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 115,78%.

## SS 8: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

K-WIDE	SS 8: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	8a-N - Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100 (skala 95%)	
Realisasi	171,25n	141,44	141,44	115,00	115,00	128,30	128,30	
Capaian	120%	120%	120%	115%	115%	120%	120%	

IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu tercapai 128,3%. IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu terdiri dari 2 Sub IKU meliputi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan IKU Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah.

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran yaitu Partisipasi Agenda Setting dan Employee Advocacy. Partisipasi Agenda Setting merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan sesuai taktik yang terdapat pada topik Agenda Setting Kementerian Keuangan. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut di tataran unit vertikal DJKN adalah dokumen strategi komunikasi tematik yang kami sampaikan secara berkala melalui nota dinas. Selama tahun 2023, terdapat 24 (dua puluh empat) dokumen strategi komunikasi tematik berdasarkan Agenda Setting Kementerian Keuangan, yang terdiri 9 (sembilan) dokumen strategi komunikasi tematik pada Semester I dari 15 (lima belas) dokumen strategi komunikasi tematik pada Semester II. Adapun *Employee Advocacy* berupa tugas

amplifikasi konten media sosial Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh pemangku tugas komunikasi. Pada tahun 2023, terdapat 25 topik yang perlu diamplifikasi pemangku tugas, yang terdiri dari 11 topik pada semester I dan 14 (empat belas) topik pada semester II.

Berdasarkan data yang disampaikan Direktorat Hukum dan Humas, Tingkat partisipasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada Agenda Setting semester I mencapai 100, dan semester II sebesar 100. Adapun Tingkat partisipasi *employee advocacy* pada semester I dan semester II, masing-masing mencapai 100. Dengan capaian tersebut, maka capaian IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan Kanwil Papua, Papua Barat dan Maluku mencapai 5,17 atau 145,49% dari target sebesar 3,55.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dalam melaksanakan *employee advocacy*, dilakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

1. Menyampaikan himbauan partisipasi pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku untuk berpartisipasi dalam kegiatan *employee advocacy* melalui nota dinas Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.
2. Membentuk grup Whatsapp khusus *employee advocacy* yang beranggotakan seluruh pegawai pemangku tugas *employee advocacy*
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *employee advocacy* dengan meminta informasi pelaksanaan *employee advocacy* di lingkup Kanwil DJKN Papabaruku pada dashboard Kantor Pusat, sehingga dapat disusun langkah-langkah lebih lanjut agar pelaksanaan *employee advocacy* dapat terlaksana secara baik.

Sub IKU yang kedua IKU Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah, yang merupakan sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka penguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu Perwakilan Kementerian

Keuangan (KMK 394/2022), *Regional Chief Economist* (KMK 395/2022), dan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022). Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan. IKU ini dilaksanakan dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan baik. Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekerwil wilayah, yaitu: Join program penerimaan (30%), RCE (35%), dan Sinergi UMKM (35%). Berdasarkan data capaian IKU Kewilayahan, kegiatan Join program penerimaan, RCE, dan Sinergi UMKM pada wilayah Papua tercapai 100%, dari target sebesar 90%, sehingga sub IKU Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah terealisasi 111,11%.

Berdasarkan capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan IKU Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah tersebut, maka Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku tercapai sebesar 128,30%.

### SS 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

K-WIDE	SS 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9a-CP - Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	
Realisasi	114,60	114,60	114,60	120,00	120,00	114,52	114,52	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	115%	115%	

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 114,52%.

K-WIDE	SS 9: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	9b-N - Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target						100%	100%	
Realisasi						139,90%	139,90%	
Capaian						120%	120%	

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni Proses Pengajuan Sertifikasi, Pemanfaatan Aplikasi BMN, dan Pemanfaatan Sistem Pengadaan. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2023 mencapai 139,90%.

### SS 10: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

K-WIDE	SS 10: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	10b-N - Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	-	-	-	-	60	60	
Realisasi						84,70	84,70	
Capaian						141,17%	141,17%	

Realisasi Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif tercapai sebesar 84,70 dari target 60. Kegiatan pengawasan dan pengendalian meliputi sebelas unsur diantaranya Dukungan SDM, Akses Data & Informasi serta Komunikasi, Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), Penyusunan dan Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS), Penyusunan Profil Pegawai, Penyusunan Simpulan dan LPPI, Jumlah Pengaduan Masyarakat, Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI, Kepuasan Stakeholders, serta Hasil Survei Penilaian Integritas. Kesebelas unsur tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian dihitung secara mandiri menggunakan Kertas Kerja Penilaian Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif, yang selanjutnya di review oleh Unit Kepatuhan Internal Tingkat I. Pada tahun 2023, realisasi Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif tercapai sebesar 84,70 dari target 60.

## SS 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

K-WIDE	SS 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	11a-N - Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	-	-	-	-	-	80	80	
Realisasi						96,65	96,65	
Capaian						120%	120%	

Perhitungan IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu Nilai reviu Kinerja Pegawai dengan capaian 94,15, Nilai reviu Kinerja Organisasi dengan capaian 94,84 dan Indeks Kualitas Manajemen Risiko dengan capaian sebesar 99,87. Dengan target sebesar 80 dan capaian dari ketiga komponen sebesar 96,55, maka capaian IKU ini tahun 2023 adalah sebesar 120,81%. Selain itu, atas pengelolaan risiko sepanjang tahun 2023, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memperoleh prestasi Manajemen Risiko Organisasi Terbaik I Tingkat Nasional.

K-WIDE	SS 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	11b-N - Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sml	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	POL/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	25,45%	116,36%	116,36%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi dari persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120,00% dari target sebesar 100%, hal ini terjadi karena pengelolaan kinerja pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berbasis BSC. Capaian ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku terhadap kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya pegawai ditugaskan untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi.

Adapun perbandingan capaian kinerja organisasi pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dibandingkan

dengan anggaran yang tersedia adalah sebagai berikut.

Tahun	Pagu Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Target NKO	Capaian NKO
2020	Rp4.754.620.000	98,27%	100%	110,05%
2021	Rp2.307.929.000	97,23%	100%	113,51%
2022	Rp1.935.303.000	97,25%	100%	115,10%
2023	Rp3.096.802.000	91,73%	100%	112,59%

Capaian yang diraih oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam waktu 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan adanya adanya pandemi Covid-19 yang membuat capaian pada 2020 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbaikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kerja keras Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan para *stakeholder*. Meskipun dengan hambatan dalam mencapai target kinerja, seluruh jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tetap memberikan kinerja terbaik sehingga mendapatkan capaian yang maksimal.

Guna menunjang kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, berbagai inovasi layanan juga disusun agar memberikan kemudahan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. layanan pengaduan melalui media aplikasi *whatsapp* dan *google sheet*;
2. layanan *chatbot* NokenAle; dan
3. dashboard yang memberikan data capaian kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di tahun 2023 adalah sebesar Rp2.840.729.140,- atau 91,73% dari Pagu yang disediakan sebesar Rp3.096.802.000,-. Pagu tersebut terdiri dari belanja barang Rp2.138.102.000,- belanja modal Rp958.700.000,-.

## Bab IV

### Penutup

Matahari juga turut berpengaruh dalam menjadi siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah



## **Bab IV**

### **Penutup**

Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2023 merupakan capaian yang istimewa dengan NKO sebesar 112,59%. Hal ini bisa dilihat dari capaian yang diraih selama tahun 2023 dimana 20 IKU yang dimiliki Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, mayoritas IKU dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan (hijau), hanya terdapat 1 (satu) IKU yang tidak tercapai (kuning) yaitu Realisasi Pokok Lelang sehingga menyebabkan penurunan NKO dari tahun sebelumnya. Capaian NKO Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tersebut, tidak terlepas dari makin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku termasuk jajaran KPKNL di bawahnya.

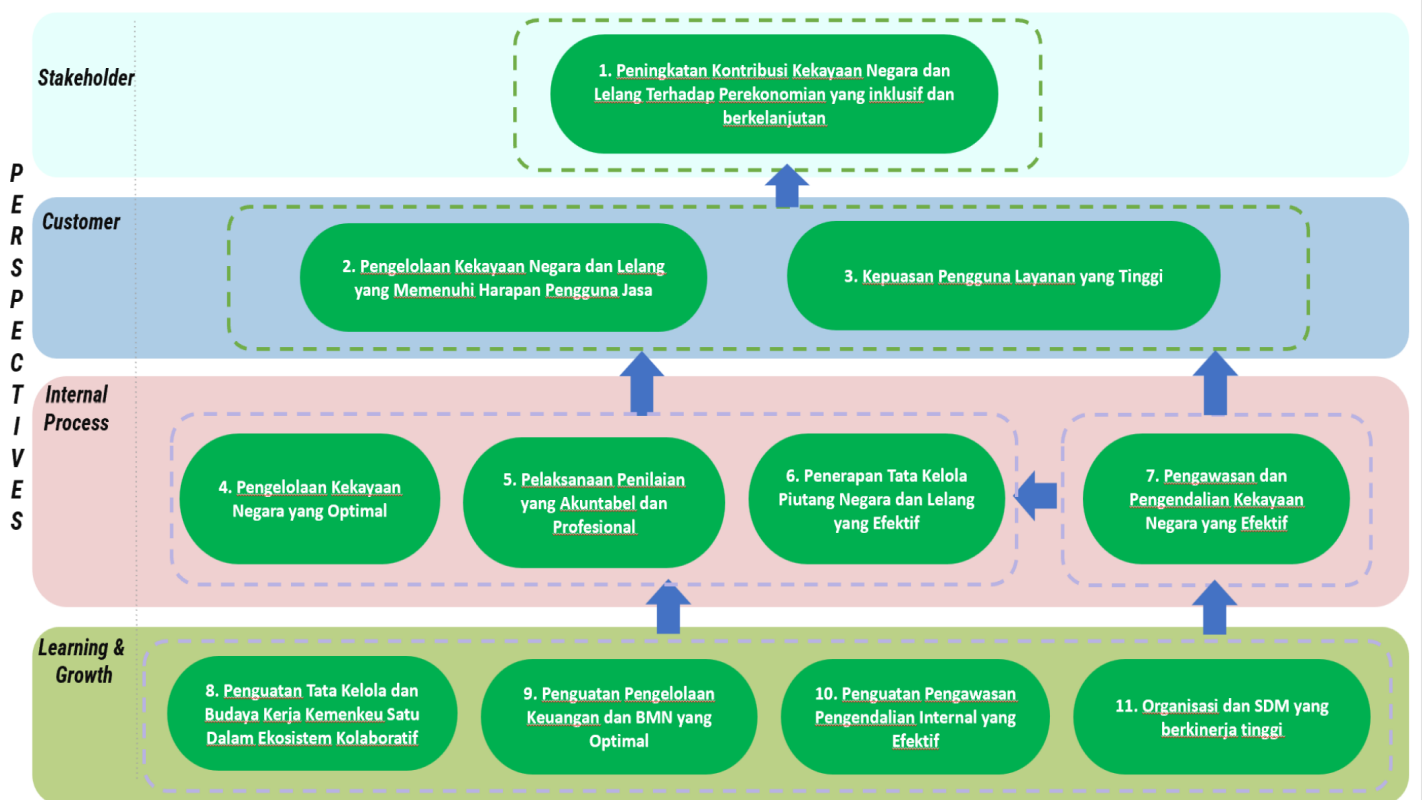
Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, yaitu dengan bekerja lebih giat serta terus menerus membangun semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menjadi karakter kinerja seluruh pegawai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi/capaian kinerja yang sudah baik dan terus berusaha untuk meningkatkannya.

# LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-29/KN/2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,  
PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	4a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4c-N Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%
		4c1-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		4c2-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		5b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	90%
		6a1-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		6a2-N Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
		6b-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%
7.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	7a-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	8a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)
		8a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)
		8a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)
9.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%
		9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
10.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Indeks Integritas Organisasi	94,33
		10a1-CP	Indeks Integritas	88,67
		10a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		11b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

**Program/Kegiatan Tahun 2023**

**Anggaran**

**Program:**



**Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko** Rp 798.567.000

**Kegiatan**

- |  |    |             |
|--|----|-------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi            | Rp | 25.187.000  |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp | 25.812.000  |
| 3. Pengelolaan Aset                                  | Rp | 747.568.000 |

**Program:**

**Dukungan Manajemen** Rp 2.298.235.000

- |  |    |               |
|--|----|---------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi                                    | Rp | 21.568.000    |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                       | Rp | 2.229.795.000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik               | Rp | 25.304.000    |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp | 21.568.000    |

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,  
PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN	12%	41%	41%	65%	65%	84%	84%
	4c1-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
	4c2-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70



Kode SS/IKU	SS dan IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online		57%	67%	67%	78%	78%	90%	90%
	6a1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	6a2-N	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
7a-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	50%	-	50%	86%	86%
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif								
8a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100	100	100	100 (95%)
	8a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
	8a2-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (20%)	100 (45%)	100 (45%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran		95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5 %
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif								
10a-N	Indeks Integritas Organisasi		-	-	-	-	-	94,33	94,33
	10a1-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
	10a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		-	-	-	-	-	60	60
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi								
11a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	-	-	-	80	80
11b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%



Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo, S.E., M.M.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	197209021993011001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
<b>HASIL KERJA</b>				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan



3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis	
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis	
		Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%	Proses Bisnis	
		Sub-IKI 1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		68%
		Sub-IKI 2	Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset)		100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis	
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70	Proses Bisnis	
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	90%	Proses Bisnis	
		Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction		94%
		Sub-IKI 2	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online		86%
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis	
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis	
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Tingkat Implementasi Budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100 (95%)	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem		100



			Kehumasan	(3,55 skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks kinerja kualitas Pelaksanaan anggaran		95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Integritas Organisasi		94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Integritas	88,67	
		Sub-IKI 2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		60	Penguatan Internal atau Anggaran
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>					
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100	Penerima Layanan
2.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Dewan Pengawas BLU pada Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Kesdam XVII/Cendrawasih		100	Penguatan Internal atau Anggaran



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
		Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Jakarta, 30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

197209021993011001



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	41 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%



7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
8	Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN		12%	41%	41%	65%	65%	84%	84%
	Sub-IKI 1	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
	Sub-IKI 2	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
9	Deviasi ketergunaan hasil penilaian		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien		70	70	70	70	70	70	70
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online		57%	67%	67%	78%	78%	90%	90%
	Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
	Sub-IKI 2	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	50%	-	50%	86%	86%
14	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100	100	100	100 (95%)
	Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	-	100	100	100 (3,55 skala 4)
	Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (20%)	100 (45%)	100 (45%)	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)



15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
17	Indeks Integritas Organisasi		-	-	-	-	-	94,33	94,33
	Sub-IKI 1	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
	Sub-IKI 2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif		-	-	-	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		-	-	-	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>KONSEKUENSI</b>									
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Jakarta, 30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

197209021993011001



Ditandatangani secara elektronik

Rionald Silaban

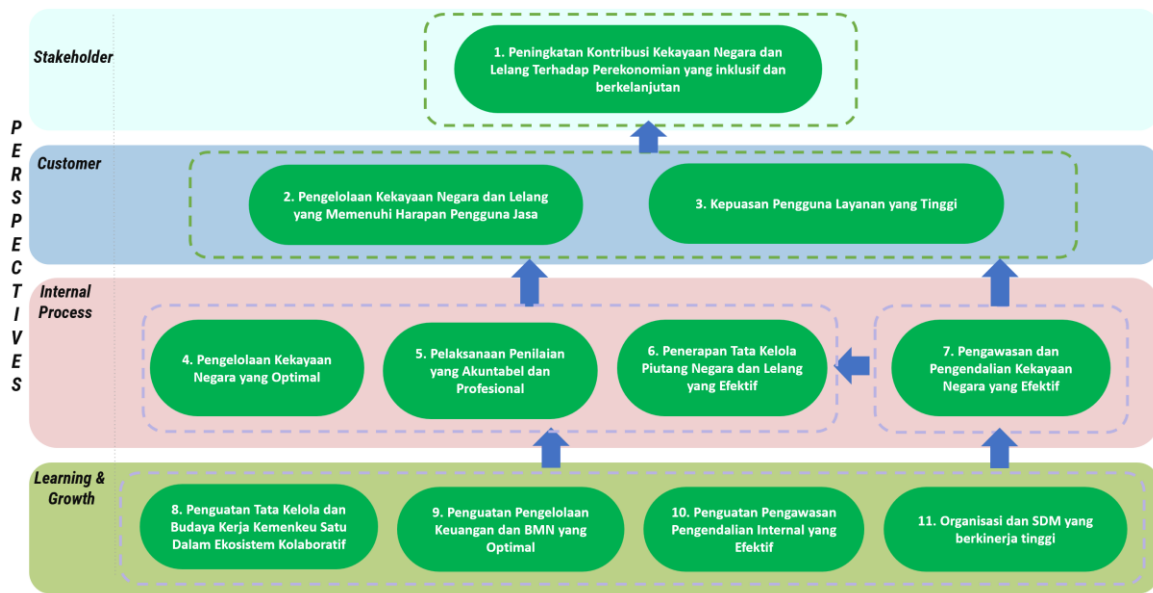
196604231990101001



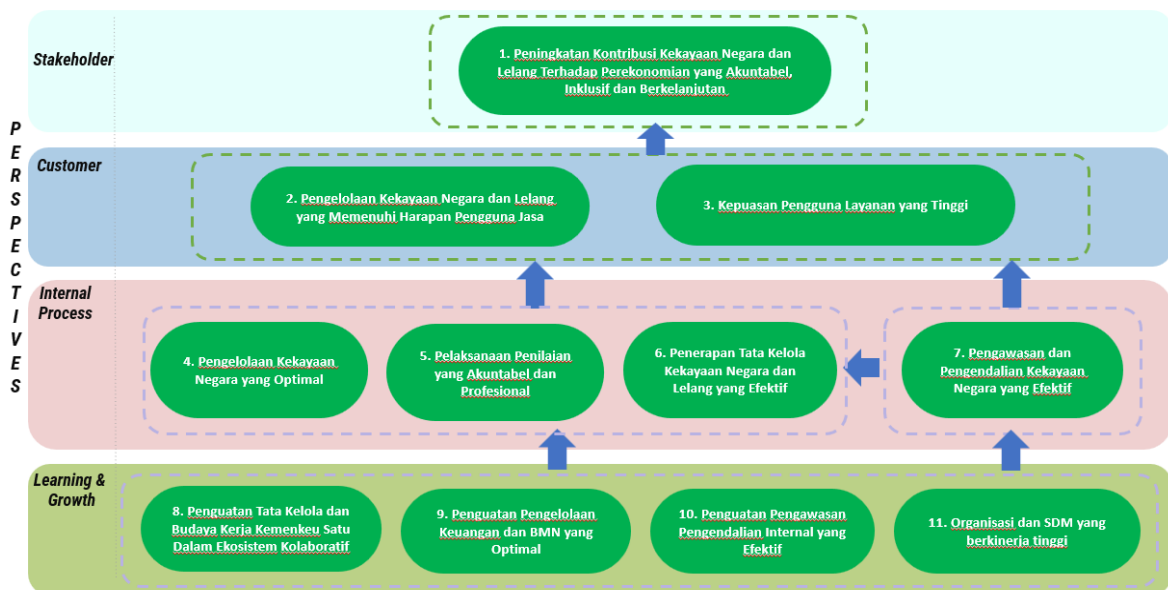
# ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-29A/KN/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-29/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

## Peta Strategis sebelum adendum:



## Peta Strategis setelah adendum:



**a. Perubahan Nama Sasaran Strategis**

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

**b. Perubahan Nama IKU**

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU
4c2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	6c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

**c. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	Sd Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
10a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
4c2-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	6c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

**d. Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q3	S.d. Q3	Q4	Y
4c1-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%	4d-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%

**e. Penghapusan IKU dan Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
4c-N	Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku karena Sub-IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan menjadi IKU.
6b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
10a-N	Indeks integritas organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku karena Sub-IKU Indeks integritas bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dihapus.
10a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	Sub-IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

**f. Perubahan Trajectory IKU dan Sub-IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	78%	78%	90%	90%	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang secara Online	78,50%	78,50%	90%	90%
8a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100 (95%)	8a-N	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu	100	100	100	100
8a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	100 (3,55 Skala 4)	8a1-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100 (3,55 Skala 4)	100 (3,55 Skala 4)	100 (3,55 Skala 4)
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Jakarta, 22 September 2023  
Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku tanggal 17 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	83,63%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	61,54%	Proses Bisnis
		Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN	75,78%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	
		Sub-IKI 2 Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	83,55%	
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	90%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	
		Sub-IKI 2 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	
		Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis

Sebelum					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100 (95%)	Penguatan internal atau anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 Skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran		95,5	Penguatan internal atau anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	Penguatan internal atau anggaran
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas Organisasi		94,33	Penguatan internal atau anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Integritas	88.67	
		Sub-IKI 2	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		60	Penguatan internal atau anggaran

Menjadi					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		83,63%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang		80%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas		88.67	Penerima Layanan
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		100%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		61,54%	Proses Bisnis

Menjadi					
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu		Target	Perspektif
		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		68%	Proses Bisnis
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online		90%	Proses Bisnis
		Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	
		Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		83,55%	Proses Bisnis
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat implementasi budaya dan kehumasan Kemenkeu Satu		100	Penguatan internal atau anggaran
		Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 Skala 4)	
		Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (90%)	
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		100	Penguatan internal atau anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	Penguatan internal atau anggaran
10	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		60	Penguatan internal atau anggaran

## B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

### Skema pertanggungjawaban

#### 1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	83,63%	83,63%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	83,63%	83,63%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	92,62%	92,62%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	35%	35%	58,5%	58,5%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	92,62%	92,62%
5	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	11%	11%	100%	100%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	35%	35%	58,5%	58,5%
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%	6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	11%	11%	100%	100%
7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60%	60%	61,54%	61,54%	7	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	60%	60%	100%	100%

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8	Persentase Optimalisasi Pengelolaan BMN		65%	65%	75,78%	75,78%	8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		60%	60%	61,54%	61,54%
	Sub-IKI 1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	55%	68%	68%							
	Sub-IKI 2	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	83.55%	83.55%							
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25%	25%	25%	25%	9	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		55%	55%	68%	68%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		70	70	70	70	10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		25%	25%	25%	25%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online		78%	78%	90%	90%	11	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		70	70	70	70
	Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%							
	Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	86%	86%							
12	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN		15%	15%	15%	15%	12	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online		78,50%	78,50%	90%	90%

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
							Sub-IKI 1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	
							Sub-IKI 2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	86%	86%	
13	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	86%	86%	13	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		75%	75%	83,55%	83,55%
14	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100 (95%)	14	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		-	50%	86%	86%
	Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	100	100	100 (3,55 skala 4)							
	Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)							

Sebelum						Menjadi							
No	IKI		Target				No	IKI		Target			
			Q3	s.d. Q3	Q4	Y				Q3	s.d. Q3	Q4	Y
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	15	Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu		100	100	100	100
							Sub-IKI 1	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		-	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)	100 (3,55 skala 4)
							Sub-IKI 2	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah		100 (70%)	100 (70%)	100 (90%)	100 (90%)
16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		85%	85%	100%	100%	16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		100	100	100	100
17	Indeks Integritas Organisasi		-	-	94,33	94,33	17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		-	-	100%	100%
	Sub-IKI 1	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67							
	Sub-IKI 2	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	100 (Level 4)	100 (Level 4)							
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		-	-	60	60	18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		-	-	60	60

Sebelum					Menjadi						
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%

Adendum Sasaran Kinerja Pegawai ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Jakarta, 22 September 2023

Menyetujui,  
Direktur Jenderal

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



